

ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2011-2013

Yeni Herlinawati

Program Studi D IV Keuangan Daerah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten sarolangun menggunakan konsep Value For Money atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan dengan pendekatan konsep value for money yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penerapan konsep value for money atas kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan rasio ekonomi secara keseluruhan menunjukkan realisasi penerimaan PAD melebihi anggaran penerimaan PAD sehingga dapat dikatakan **ekonomis**. rasio efisiensi menunjukkan rencana program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan **tidak efisien** karena rasio yang diperoleh secara rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai 1177 % atau di atas 100%. dari tahun 2011, 2012 dan 2013 rasio efisiensi di atas 100% dan cukup tinggi atau hasilnya jika dijumlah dan dirata-ratakan secara keseluruhan dapat dikatakan tidak efisien. rasio efektifitas menunjukkan rencana program dan kegiatan yang di jalankan oleh pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan dapat dikatakan **efektif** karena rasio yang di peroleh secara rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mencapai 906%.

Kata kunci : Kinerja keuangan, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas

Abstract

The purpose of this research is to discover how the government financial of Sarolangun district performs applying concept "value for money" of the APBD implementation at 2011 thru 2013 periods. The analytical methods for this research use Quantitative analysis and Qualitative analysis methods. The analytical media use for this research is financial ratios with approaching concept "value for money" consisting of Economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. Based on calculation result and applying concept "value for money" of the government financial of Sarolangun district performs at 2011 thru 2013 periods as overall economic ratios showing realization PAD acceptance exceed approximate PAD acceptance, so that can be said economics efficiency ratios showing the activity and program plan of the government of Sarolangun district during 2011 thru 2013 periods can be said un effecience because obrain ratios on averages from 2011 thru 2013 reached 1177% or above 100% from 2011, 2012 and 2013, effeciciency ratio above 100% Quite hight if its to calculate and overall averages can be said unefficiency effectivity ratio showing the activity and program plan of the government of Sarolangun district during 2011 thru 2013 periods in overall can be said effective because obrain ratios on averages from 2011 thru 2013 reached 906%.

Key words: Financial implementation, value for money, Economic, efficiency and effectivity.

1. PENDAHULUAN

Sebagai gambaran awal mengenai APBD kabupaten sarolangun, dapat dilihat bahwa pengelolaan dan capaian pendapatan asli daerah masih belum optimal dimana kontribusi pendapatan Pemerintah kabupaten sarolangun terbesar berasal dari dana perimbangan. Gambaran mengenai perkembangan keuangan daerah kabupaten sarolangun selama periode tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Masih rendahnya proporsi PAD kabupaten sarolangun dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian daerah. Besarnya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan juga menunjukkan masih besarnya ketergantungan daerah kabupaten sarolangun terhadap Keuangan pemerintah provinsi jambi sekaligus juga menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten sarolangun belum mampu memaksimalkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan.

Penelitian ini bermaksud mengulang kembali penilaian kinerja sektor publik (dalam hal ini Pemerintah kabupaten Sarolangun) dengan menggunakan konsep *value for money* yang difokuskan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ada beberapa hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan *konsep value for money*.

Nugrahani (2007) meneliti mengenai penerapan konsep *value for money* pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitiannya maka kinerja keuangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta cukup efisien, ekonomis, tetapi kurang efektif.

Prayetno (2012) melakukan penelitian analisis penerapan konsep *value for money* dalam menilai kinerja finansial Pemerintah Daerah kabupaten Batanghari. Hasil penelitiannya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif. Dikatakan ekonomis karena rasio yang dicapai melebihi 100% atau jumlah Realisasi Penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Dikatakan efisien karena rasio yang dicapai kurang dari 100% dan tidak efektif karena rasio yang dicapai melebihi 100%.

Annisa (2011) melakukan penelitian evaluasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui pendekatan *value for money*. Hasil penelitiannya berdasarkan tingkat ekonomi dari kinerja menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melaksanakan kerjanya dengan ekonomis. Berdasarkan pengukuran nilai efisiensi pada ketiga program Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari *output* pada setiap program yang penulis teliti, mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* minimal atau *input* yang telah ditentukan. Sedangkan Untuk pengukuran nilai efektivitas, Dinas Kesehatan Kota Makassar belum mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugrahani (2007) mengenai penerapan konsep *value for money* pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prayetno (2012) mengenai konsep *value for money* dalam menilai kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dikatakan ekonomis karena rasio, sedangkan yang akan penulis lakukan penelitian mengenai analisis konsep kinerja keuangan daerah dengan *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dengan alasan untuk menguji apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi telah ekonomis, efisien, dan efektif jika diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. Penelitian ini menggunakan objek, periode, dan APBD yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan secara resmi oleh instansi/ lembaga yang bersangkutan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk time series/ rentang waktu yang meliputi: data realisasi APBD kabupaten Sarolangun tahun 2011-2013.

Jenis dari sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah: Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, berupa dokumen, informasi, data-data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD).

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data *observasi nonpartisipan*. Menurut Sugiyono (2010) *Observasi nonpartisipan* yaitu penelitian yang penelitiannya tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lembaga atau instansi terkait

Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif:

1. Menurut Sugiyono (2012) metode analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data penelitian berupa angka-angka kemudian dianalisis. Data yang peneliti gunakan dalam analisis kuantitatif adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten sarolangun tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013
2. Menurut Sugiyono (2012) metode analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara membandingkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan fakta yang terjadi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan yang telah didapat.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan dengan pendekatan konsep *value for money* yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas (Nugrahani, 2007).

Realisasi Penerimaan PAD

1. Rasio Ekonomi = $\frac{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga termurah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan actual dengan yang direncanakan (Lapsey Ulum dan Murtin, 2004). Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis apabila rasionya diatas 100%, atau jumlah realisasi penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan.

Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD

2. Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100% semakin

kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik.

$$3. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil}}$$

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Pengukuran atau penilaian kinerja keuangan dengan *value for money* merupakan bagian penting dalam setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik, terutama tentunya pada pemerintah daerah. Sasaran pengukuran *value for money* adalah pengukuran atas kegiatan secara finansial, dimana kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan tergambar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Kepala Daerah yang menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Berangkat dari dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri yang dituangkan dalam bentuk APBD, secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, tidak terkecuali tentunya Pemerintah Daerah kabupaten sarolangun. Untuk memperoleh gambaran awal secara umum bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten sarolangun, berikut disajikan data gambaran makro Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten sarolangun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tampak pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013

Struktur APBD		Tahun		
		Anggaran 2011	Realisasi 2011	%
No	PENDAPATAN DAERAH	616.895.550.406,00	678.808.287.593,77	9,71
1	PAD	21.329.500.000,00	26.896.483.592,00	26,10
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	86.763.473.280,00	128.707.626.842,77	48,34
BELANJA DAERAH		624.836.741.315,17	709.927.813.915,17	13,62

1	Belanja Tidak Langsung	315.171.050.392,00	322.350.647.883,00	2,28
2	Belanja Langsung	309.665.690.923,17	387.577.166.032,17	25,16
	Surplus / defisit	(7.941.190.909,17)	(33.119.526.321,40)	317,06
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan pembiayaan	10.331.669.989,17	38.010.005.401,40	267,90
2	Pengeluaran pembiayaan	2.390.479.080,00	4.890.479.080,00	104,58
	Pembiayaan netto	7.941.190.909,17	33.119.526.321,40	317,06
	SILPA	0,00	0,00	0,00
		Anggaran 2012	Realisai 2012	%
No	PENDAPATAN DAERAH	852.684.920.158,00	757.249.438.335,00	(11,19)
1	PAD	30.150.000.000,00	31.453.982.000,00	4,32
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	224.934.766.999,00	110.695.303.176,00	(50,79)
BELANJA DAERAH		872.293.395.333,00	816.611.263.104,00	(6,38)
1	Belanja Tidak Langsung	323.882.801.355,00	359.549.034.174,00	11,10
2	Belanja Langsung	548.410.593.978,00	457.062.228.930,00	(16,66)
	Surplus / defisit	(19.608.475.175,00)	(59.361.824.769,00)	202,74
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan pembiayaan	35.376.225.175,00	65.129.574.769,00	84,11
2	Pengeluaran pembiayaan	15.767.750.000,00	5.767.750.000,00	(63,42)
	Pembiayaan netto	19.608.475.175,00	59.361.824.769,00	202,74
	SILPA	0,00	0,00	0,00
		Anggaran 2013	Realisai 2013	%
No	PENDAPATAN DAERAH	782.315.173.817,50	789.558.475.077,50	0,93
1	PAD	31.293.482.000,00	31.293.482.000,00	0,00
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.411.658.098,50	85.639.158.098,50	1,45
BELANJA DAERAH		812.068.532.709,00	865.762.862.847,69	6,61
1	Belanja Tidak Langsung	367.232.699.996,00	372.087.497.681,69	1,32
2	Belanja Langsung	444.832.832.713,00	493.675.365.166,00	10,98
	Surplus / defisit	(29.750.358.891,50)	(76.204.387.770,19)	156,15
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan pembiayaan	31.667.993.367,00	7.500.531.868,17	(76,32)
2	Pengeluaran pembiayaan	4.148.420.473,00	6.411.788.661,00	54,56
	Pembiayaan netto	29.750.358.891,50	76.204.387.770,19	156,15
	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan berorientasi kepada kepentingan publik (akuntabilitas) yang dapat menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerahnya sendiri secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu konsep penilaian kinerja keuangan yaitu dengan konsep *value for money* yang meliputi rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Untuk itu, Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah kabupaten sarolangun ini dihitung dan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan berdasarkan konsep *value for money* tersebut. Data yang digunakan, diolah dan dianalisis untuk menerapkan konsep tersebut yaitu sebagian dari data Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah kabupaten sarolangun Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun 2013 sebagaimana disajikan pada tabel 1 di atas.

Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Penerapan Konsep *Value For Money*

Untuk melakukan analisis penerapan konsep *Value For Money* sebagaimana telah diketahui sebelumnya memerlukan data berapa besarnya jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD), Anggaran Penerimaan PAD, Belanja untuk PAD dan Target PAD Potensial. Data yang dimaksud disajikan pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 2. Realisasi, Anggaran, Belanja, dan Target PAD Potensial

Keterangan	Tahun		
	2011	2012	2013
Realisasi penerimaan PAD	26.896.483.592,00	31.453.982.000,00	31.293.482.000,00
Anggaran penerimaan PAD	21.329.500.000,00	30.150.000.000,00	31.293.482.000,00
Belanja untuk memungut PAD	322.350.647.883,00	359.549.034.174,00	865.762.862.847,69
Target PAD berdasarkan potensi riil	310.121.050.392,00	318.832.801.355,00	361.182.699.996,00

Sumber: DPPKAD kabupaten sarolangun

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa Realisasi Penerimaan PAD mengalami peningkatan di tahun 2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013. Tahun 2011 persentasenya sebesar 26,10 %, tahun 2012 persentasenya menurun menjadi sebesar 4,32 %, dan di tahun 2013 persentasenya turun menjadi 0,00%.

Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* dengan Rasio Ekonomi

Secara teoritis dinyatakan bahwa ekonomi adalah perbandingan antara masukan (*input*) yang terjadi dengan nilai masukan (*input*) yang seharusnya atau dengan kata lain ekonomi merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga terendah. Dalam konteks ekonomi sektor publik berarti terkait dengan seberapa jauh organisasi sektor publik tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang digunakan seminimal mungkin dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Ekonomi

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Hasil	Persentase
2011	26.896.483.592,00	21.329.500.000,00	1,26	126 %
2012	31.453.982.000,00	30.150.000.000,00	1,04	104 %
2013	31.293.482.000,00	31.293.482.000,00	1	100 %

Sumber: DPPKAD kabupaten sarolangun

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 dapat dijelaskan, bahwa penerapan konsep *value for money* dengan rasio ekonomi pada Pemerintah kabupaten sarolangun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan realisasi penerimaan PAD melebihi anggaran penerimaan PAD, yang tandai dengan persentasenya di atas 100%. Hal ini berarti rasio realisasi penerimaan PAD terhadap anggaran penerimaan PAD dapat dikatakan **ekonomis** dan itu terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, jika dianalisis lebih jauh persentasenya tampak menjadi lebih menarik. Pada tahun 2011 persentasenya 126 %, kemudian tahun 2012 menurun menjadi 104 %, dan di tahun 2013, kembali mengalami penurunan menjadi 100 %. Secara keseluruhan jika dihitung rata-rata selama 3 (tiga) tahun diperoleh angka rata-rata rasio ekonomi sebesar 3,30 (330%). Ini artinya walaupun kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun setiap tahunnya dapat dikatakan ekonomis, namun kemampuan mencapai rasio atau persentase ekonomis setelah tahun 2012 cenderung terus mengalami penurunan atau dengan kata lain terdapat sedikit kecenderungan penurunan kinerja.

Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* dengan Rasio Efisiensi

Jika ekonomi hanya berbicara mengenai *input*, yaitu bagaimana memperoleh *input* dengan biaya atau harga lebih rendah, maka efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*.

Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut (Mahmudi, 2005). Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 1 atau di bawah 100% (semakin kecil rasio ini akan semakin baik).

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Belanja Untuk Memungut	Realisasi Penerimaan PAD	Hasil	Persentase
2011	322.350.647.883,00	26.896.483.592,00	11,98	1198 %
2012	359.549.034.174,00	31.453.982.000,00	11,43	1143 %
2013	372.082.497.681,69	31.293.482.000,00	11,89	1189 %

Sumber: DPPKAD kabupaten sarolangun

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 dapat dijelaskan, bahwa penerapan konsep *value for money* dengan rasio efisiensi pada Pemerintah kabupaten sarolangun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan persentase efisiensi yang selalu berubah-ubah (berfluktuasi) setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rasio efisiensi diperoleh sebesar 11,98 (1198%) atau di atas 100% berarti **tidak efisien**. Tahun 2012 rasio efisiensi turun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 11,43 (1143%) atau di atas 100% berarti **tidak efisien**. Tahun 2013 rasio efisiensi naik menjadi 11,89 (1189%) atau di atas 100% berarti **tidak efisien**. secara keseluruhan jika dirata-ratakan selama 3 (tiga) tahun diperoleh angka rata-rata rasio sebesar 35,30 (3530 %) atau di atas 100%. Ini berarti kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun secara keseluruhan dapat dikatakan **tidak efisien**.

Analisis Penerapan Konsep Value For Money dengan Rasio Efektifitas

Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2005). Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks penerapannya di sektor publik atau di pemerintah daerah, rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun jika semakin tinggi rasio efektifitas atau di atas 1 (100%) berarti semakin baik.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi riil	Hasil	Persentase
2011	26.896.483.592,00	310.121.050.392,00	8,67	867 %
2012	31.453.982.000,00	318.832.801.355,00	9,86	986 %
2013	31.293.482.000,00	361.182.699.996,00	8,66	866 %

Sumber: DPPKAD kabupaten sarolangun

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5. dapat di jelaskan, bahwa penerapan konsep *value for money* dengan rasio efektifitas pada pemerintah kabupaten sarolangun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan persentase

efektif yang selalu berubah-ubah (berfluktuasi) setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rasio efektifitas di peroleh sebesar 8,67 (867 %) atau di atas 100 % berarti dapat dikatakan **efektif**. Tahun 2012 rasio efektifitas naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 9,86 (986 %) atau di atas 100% berarti dikatakan **efektif**. Tahun 2013 rasio efektifitas turun dari tahun sebelumnya menjadi 8,66 (866 %) atau di atas 100 % berarti tetap diktakan **efektif**. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio atau persentase efektifitas jika di rata-ratakan selama 3 (tiga) tahun di peroleh angka, rata-rata rasio sebesar 9,06 (906%) atau di atas 100%. Ini berarti kinerja keuangan pemerintah kabupaten sarolangun secara keseluruhan tetap dapat dikatakan **efektif**.

Pembahasan

Setelah melakukan perhitungan dan analisis rasio, maka berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut dapat diketahui bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah kabupaten sarolangun terhadap realisasinya pada setiap alokasi. Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disajikan pada selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disajikan pada selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disajikan pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 6. Hasil Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun Berdasarkan Rasio Ekonomi, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektifitas Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013

Tahun Anggaran	Rasio Ekonomi	Rasio Efisiensi	RasioEfektivitas
2011	126 %	1198 %	867 %
2012	104 %	1143 %	986 %
2013	100 %	1189 %	866 %
Rata-Rata	110 %	1177 %	906 %

Sumber: DPPKAD kabupaten sarolangun

Rasio Ekonomi

Dari hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun sebagaimana tampak pada tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa dari sudut pandang rasio ekonomi menunjukkan rencana program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan **ekonomis** karena rasio yang diperoleh semua mencapai di atas 100%. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tersebut mampu merealisasikan penerimaan PAD. Ini dapat dilihat setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masukan aktual selalu lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Hanya saja jika dianalisis lebih dalam dari sudut pandang proses penganggaran, walaupun anggaran penerimaan PAD dan realisasinya dari sisi jumlah nominal dan persentasenya tampak terus mengalami peningkatan, namun persentase peningkatannya cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2011 atau dengan kata lain peningkatannya bersifat progresif degresif.

Lebih jauh, dari tabel 5.3 dapat dilihat, bahwa anggaran penerimaan PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten sarolangun nilainya selalu dibawah angka realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan penganggaran Pemerintah kabupaten sarolangun dapat dikatakan kurang optimistis, karena tidak ada upaya yang berani untuk menetapkan target atau anggaran yang setidaknya sama bila perlu lebih dari realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

Namun demikian, kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun dilihat dari rasio

ekonomi tetap dapat dikatakan ekonomis karena masukan aktual lebih besar dari yang dianggarkan dengan rasio yang mencapai di atas 100%, atau secara rata-rata selama 3 (tiga) tahun sebesar 110%.

Rasio Efisiensi

Dari hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah kabupaten sarolangun sebagaimana tampak pada tabel 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa dari sudut pandang rasio efisiensi menunjukkan rencana program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan **tidak efisien** karena rasio yang diperoleh secara rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai 1177 % atau di atas 100%. dari tahun 2011, 2012 dan 2013 rasio efisiensi di atas 100% dan cukup tinggi atau hasilnya jika dijumlah dan dirata-ratakan secara keseluruhan dapat dikatakan tidak efisien. Dilihat dari sudut pandang proses penganggaran menunjukkan, bahwa proses penganggaran pada Pemerintah kabupaten sarolangun tidak diperhitungkan secara memadai dan dilakukan kurang optimal.

Rasio Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2002) efektifitas tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan, namun hanya memperhatikan tingkat ketercapaian program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektifitas akan berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi, karena jika dalam pengukuran efisiensi menghabiskan semua biaya, berakibat pada kinerja yang tidak efisien. Namun, jika memungkinkan biaya untuk tetap dihabiskan demi mencapai tujuan, maka dari segi pengukuran efektifitas semua program akan berjalan efektif.

Dari hasil analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten sarolangun sebagaimana tampak pada tabel 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa dari sudut pandang rasio efektifitas menunjukkan rencana program dan kegiatan yang di jalan kan oleh pemerintah kabupaten sarolangun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan dapat dikatakan **efektif** karena rasio yang di peroleh secara rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mencapai 906% atau di atas 100% walaupun dari tahun ke tahun rasio efektifitas sangat bervariasi namun slalu tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah kabupaten sarolangun telah menjalankan anggaran sesuai dengan target yang di tetapkan bahkan selalu lebih dari yang di tetapkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio Ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menjalankan prinsip ekonomis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari persentase realisasi PAD yang selalu berada di atas anggaran, meskipun terdapat tren penurunan dari 126% (2011) menjadi 100% (2013), yang mengindikasikan menurunnya kemampuan peningkatan PAD secara ekonomis dari tahun ke tahun.
2. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode yang diteliti tidak efisien. Rasio efisiensi selalu jauh di atas 100%, dengan rata-rata 3530%, yang berarti tidak efisien biaya untuk memungut PAD sangat besar dibandingkan dengan realisasi PAD yang diterima. Hal ini mengindikasikan pemborosan sumber daya dan kurang optimalnya pengelolaan anggaran belanja untuk pemungutan PAD.
3. Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum efektif. Persentase realisasi PAD terhadap target potensi PAD selalu di atas 100%, dengan rata-rata sebesar 906%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun mampu merealisasikan PAD dengan baik melebihi target potensi yang ditetapkan, meskipun mengalami sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun.

Saran

Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan strategi pemungutan PAD agar dapat menekan biaya operasional. Langkah-langkah seperti digitalisasi proses pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pengawasan penggunaan anggaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi.

Meskipun rasio efektivitas tinggi, tren penurunan pada rasio ekonomi perlu diantisipasi. Pemerintah daerah perlu menggali potensi PAD baru serta memperkuat sektor-sektor unggulan daerah untuk menjaga pertumbuhan PAD tetap stabil dan meningkat setiap tahunnya.

Untuk menjaga kepercayaan publik, pengelolaan keuangan daerah hendaknya dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip *value for money*. Ini penting agar belanja publik benar-benar berdampak pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perlu adanya sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan real time agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah menjadi lebih akurat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. (2011). *Evaluasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui pendekatan value for money*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawijaya, S., & Dahmiri, D. (2012). Keunggulan Kompetitif Melalui Strategi Sumber Daya Manusia Di Sektor Jasa Berdasarkan Kerangka Value Chain Management. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 1(1), 75-85.
- Lapsley, I., Ulum, I., & Murtiningsih, S. (2004). *Akuntansi sektor publik: Perspektif internasional*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugrahani, R. (2007). *Penerapan konsep value for money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prayetno, E. (2012). *Analisis penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Jambi.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.